

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Teori.....	16

2.1.1 Tujuan dari UU No. 5/1999 dan paradigma <i>Structure Conduct Performance</i> (SCP)	16
2.1.1.1 Tujuan dari UU No.5/1999.....	16
2.1.1.2 Pardigma <i>Structure Conduct Performance</i> (SCP)	18
2.1.2 Tipologi monopoli dan penugasan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) kepada PERUM BULOG.....	24
2.1.2.1 Tipologi monopoli	24
2.1.2.2 Penugasan <i>Public Service Obligation</i> (PSO) kepada PERUM BULOG	34
2.1.3 Pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per Se Illegal</i> dalam UU No. 5/1999.....	38
2.2 Tinjauan Konseptual	44
2.2.1 Beras sebagai komoditi pokok dan penetapan harga beras ...	44
2.2.2 Pasar oligopoli	49
2.2.3 Posisi dominan.....	51
2.2.4 Perjanjian kartel ditinjau dari Pasal 11 UU No. 5/1999	54
2.2.5 Praktik monopoli ditinjau dari Pasal 17 UU No. 5/1999.....	57
2.2.6 Penguasaan pasar ditinjau dari Pasal 19 UU No.5/1999	60
2.2.7 Pengecualian Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999	63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	69
3.1 Jenis Penelitian.....	69
3.2 Jenis Data.....	70
3.2.1 Bahan hukum primer.....	70
3.2.2 Bahan hukum sekunder.....	72
3.2.3 Bahan hukum tersier.....	72
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	72
3.4 Jenis Pendekatan.....	73
3.5 Sifat Analisis Data.....	73
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
4.1 Hasil Penelitian.....	74
4.1.1 Harga beras pada konsumen akhir berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional) tahun 2019.....	74
4.1.2 Hasil wawancara dengan pelaku usaha di Pasar Beras Induk Cipinang dan pasa Grogol.....	77
4.1.3 Hasil wawancara dengan pakar ekonomi Prof. Bustanul Arifin.	77
4.1.4 Hasil wawancara dengan Direktorat Kebijakan Persaingan	

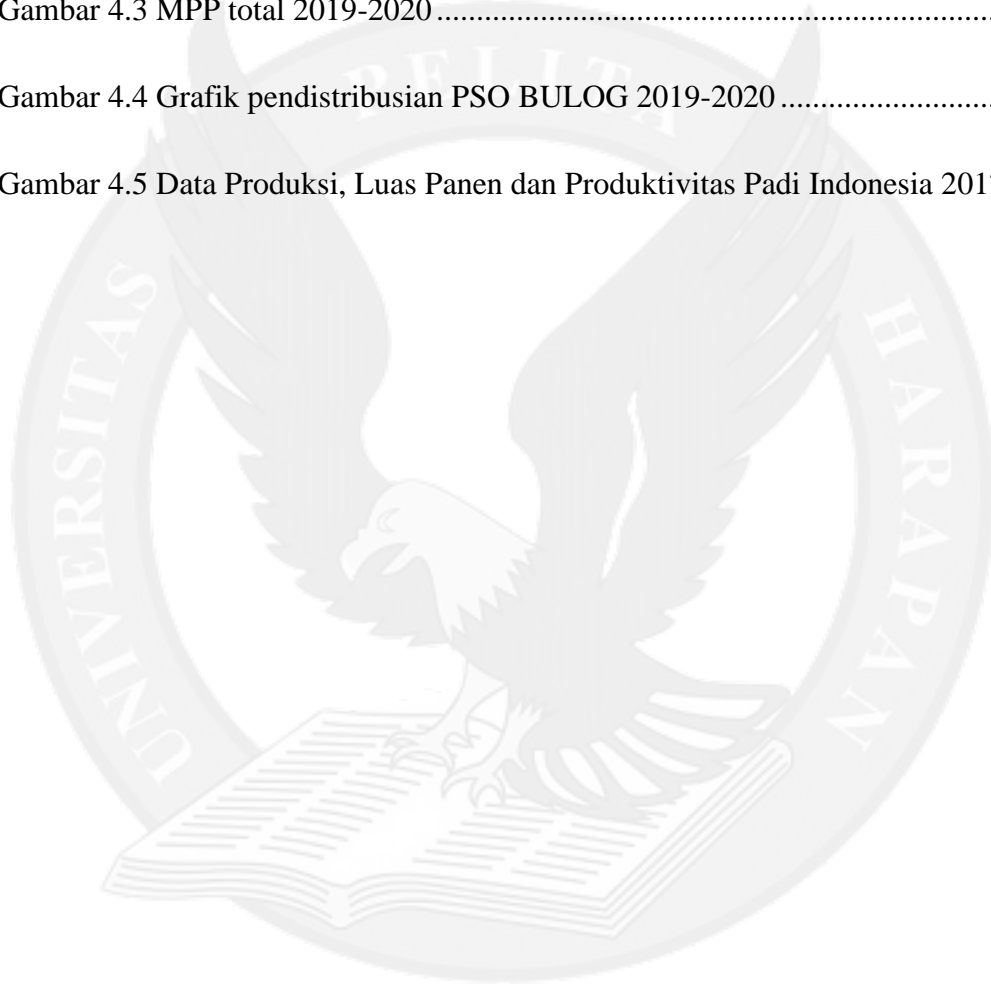
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	82
4.1.5 Hasil wawancara dengan investigator Komisi Pengawas Persaingan Usaha	92
4.2 Praktik pendistribusian beras yang dilakukan oleh PERUM BULOG dan pelaku usaha menurut UU No. 5/1999.....	96
4.2.1 Analisis pasar pendistribusian beras dengan paradigma <i>Structure Conduct Performance</i> (SCP)	96
4.2.2 Analisis PERUM BULOG sebagai pelaksana <i>Public Service Obligation</i> (PSO) dan penerapan Pasal 50 huruf a UU No. 5/1999 104	
4.2.3 Analisis pelanggaran yang dilakukan menggunakan pendekatan <i>Rule of Reason</i> dan <i>Per Se Illegal</i> dalam UU No. 5/1999.....	109
4.3 Tindakan penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh KPPU sebagai regulator terhadap pelaku usaha dan PERUM BULOG menurut UU No. 5/1999 agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada sektor pendistribusian beras	138
4.3.1 Tindakan <i>ex post</i> atau pemberian sanksi	139
4.3.2 Tindakan <i>ex ante</i> atau pencegahan.....	146

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	150
5.1 Kesimpulan.....	150
5.2 Saran	151
DAFTAR PUSTAKA.....	153
LAMPIRAN.....	165



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik nasional harga beras kualitas medium I per kg76
Gambar 4.2 Grafik nasional harga beras kualitas premium I per kg77
Gambar 4.3 MPP total 2019-202083
Gambar 4.4 Grafik pendistribusian PSO BULOG 2019-202084
Gambar 4.5 Data Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Padi Indonesia 2017-202086



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tabel rantai distribusi beras di Indonesia	82
------------------------------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.....	165
LAMPIRAN B.....	168



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Beras merupakan komoditas strategis bagi banyak negara, khususnya di kawasan Asia, karena sebagian besar penduduknya menjadikan beras sebagai makanan pokok. Oleh karena itu, kemandirian pangan di wilayah Asia pada dasarnya dapat dicerminkan oleh kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokoknya yaitu beras. Bagi Indonesia berbagai kebijakan ekonomi di bidang perberasan selalu menjadi perhatian utama Pemerintah, Legislatif, dan masyarakat.¹ Selain itu, beras juga merupakan komoditas pangan yang mendapat prioritas dalam program pembangunan nasional, mengingat beras merupakan bahan pangan pokok yang dikonsumsi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia.² Hal tersebut didasarkan pada data Badan Ketahanan Pangan yang mana disebutkan bahwa angka konsumsi beras di Indonesia tahun 2019 mencapai 94,9 persen (kg/kapita/tahun).³

Salah satu polemik yang terjadi pada komoditas pangan yaitu dengan adanya mafia pangan.⁴ Mafia pangan dalam hal ini dapat merugikan berbagai pihak yang utamanya ialah masyarakat karena adanya tindakan curang dalam pendistribusian beras yang salah satunya merupakan kegiatan menimbun beras oleh mafia yang

¹ Achmad Suryana dan Ketut Kariyasa, “Ekonomi Padi di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif”, [FAE26-1b.doc \(pertanian.go.id\)](#), Jurnal Badan Litbang Pertanian, hlm.17

² Badan Pusat Statistik, *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul Konsumsi/Pengeluaran dan Pendapatan Penduduk (Tahunan)*, 1999s

³ Badan Ketahanan Pangan, “*Roadmap – Diversifikasi Pangan Lokal Sumber Karbohidrat Non-Beras (2020-2024)*”, [Roadmap Diversifikasi Pangan 2020-2024.pdf \(pertanian.go.id\)](#), diakses pada 4 September 2021, hlm. 23

⁴ Fabian Pratama Kusumah, “Ekonomi Politik dalam Kebijakan Impor Beras: Membaca Arah Kebijakan Pemerintah 2014-2019”, *Politika: Jurnal Ilmu Politik* Vol.10, No. 2, 2019, hlm.142